

## PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DITINJAU MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

Komang Sahita Utami<sup>1</sup>, Lulup Endah Tripalupi<sup>2</sup>, Made Ary Meitriana<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [sahita.utami@gmail.com](mailto:sahita.utami@gmail.com)<sup>1</sup>, [tripalupilulup@gmail.com](mailto:tripalupilulup@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[ary.meitriana@yahoo.co.id](mailto:ary.meitriana@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran BUMDes Bhuana Utama dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau melalui kewirausahaan sosial. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota BUMDes Bhuana Utama sebanyak 2.246 orang, sampel sebanyak 340 orang diambil menggunakan teknik proporsional sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau melalui kewirausahaan sosial.

**Kata kunci:** Kewirausahaan sosial, *social value*, *civil society*, *innovation*, *economic activity*.

### Abstract

This research is a descriptive study that aims to describe the role of Bhuana Utama BUMDes in improving the welfare of members through social entrepreneurship. The population in this study were 2,246 people from Bhuana Utama BUMDes's member, 340 samples were taken using proportional sampling technique. Data were collected using a questionnaire and analyzed descriptively. The results showed that the Bhuana Utama BUMDes played a role in improving the welfare of members through social entrepreneurship.

**Keywords :** Social entrepreneurship, social value, civil society, innovation, economic activity.

### PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang ingin diwujudkan oleh setiap negara. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1 "kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya".

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dimana tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material dan spiritual (Adi, 2015).

Menurut Noor (2015) terdapat tiga parameter kesejahteraan masyarakat yaitu adanya penghasilan yang memadai, tersedianya pilihan barang dan jasa dalam rangka memuaskan kebutuhan dan

keinginan konsumsi, dan stabilitas nilai tukar. Parameter pertama yaitu pendapatan membutuhkan tersedianya sumber nafkah atau penghasilan, yaitu lapangan pekerjaan baik berupa usaha sendiri ataupun sebagai pekerja. Parameter kedua yaitu, tersedianya pilihan barang dan jasa untuk konsumsi memerlukan adanya aktivitas produksi, yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Kedua parameter tersebut dapat dihasilkan dari aktivitas ekonomi, melalui pengembangan investasi atau bisnis. Parameter ketiga yaitu stabilitas nilai tukar, berupa stabilitas internal, yaitu stabilitas harga barang jasa domestik yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi.

Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah telah memberikan fasilitas melalui berbagai bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Fasilitas tersebut meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial serta menggalakkan kewirausahaan.

Melalui berwirausaha diharapkan masyarakat dapat belajar mandiri, tidak hanya terpaksa untuk mencari pekerjaan (*job seeker*) namun dapat menciptakan lapangan pekerjaan (*job creator*). Kasmir (2014) menyatakan wirausahawan (*entrepreneur*) adalah orang yang bermental mandiri dan berjiwa berani mengambil risiko dalam berbagai kesempatan untuk membuka usaha tanpa diliputi rasa takut dan cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti.

Saat ini salah satu bentuk praktik kewirausahaan yang semakin mengemuka dan terasa manfaatnya sebagai partner pembangunan adalah kewirausahaan sosial. Praktik kewirausahaan sosial merupakan sebuah alternatif berbasis masyarakat yang berpotensi menyempurnakan proses pembangunan (Wibowo dan Nulhaqim, 2015).

Konsep kewirausahaan sosial pertama kali dikemukakan oleh Muhammad Yunus seorang pemenang nobel perdamaian dalam bidang ekonomi mikro. Muhammad Yunus mendirikan Grameen Bank, organisasi unik yang didirikan dengan satu tujuan tunggal untuk

menyalurkan kredit kecil bagi kaum miskin di Bangladesh (Kaswan dan Akhyadi, 2017).

Ada banyak definisi kewirausahaan sosial yang dikemukakan oleh para ahli, namun secara umum memiliki pengertian yang sama. Menurut Hibbert & Quinn (2015) kewirausahaan sosial adalah pemanfaatan perilaku kewirausahaan yang lebih berorientasi untuk pencapaian tujuan sosial dan tidak mengutamakan perolehan laba, atau laba yang diperoleh dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Bornstein & Davis (2010) mendefinisikan kewirausahaan sosial sebagai sebuah proses dimana warga negara membangun atau mentransformasi lembaga untuk memberikan solusi atas permasalahan sosial, seperti kemiskinan, penyakit, buta huruf, kerusakan lingkungan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan korupsi, untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi orang banyak.

Kewirausahaan sosial merupakan orang/organisasi yang memahami permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan *entrepreneurship* untuk melakukan perubahan sosial. Secara sederhana kewirausahaan sosial merupakan tindakan seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan *entrepreneurship* untuk melakukan perubahan sosial, baik bidang kesejahteraan, pendidikan maupun kesehatan (Hasanah, 2018).

Hasanah (2018) juga menyatakan bahwa pengusaha sosial (*social entrepreneur*) dapat disebut sebagai individu visioner yang mampu memberikan solusi kreatif untuk memecahkan beberapa permasalahan sosial yang terjadi di sekitar. Mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan cara untuk mengubah sistem dan menyebarkan gagasannya sehingga dapat menggerakkan seluruh masyarakat untuk bekerja sama mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Tiga aspek penting dalam pengembangan wirausaha sosial yaitu aspek manusia, aspek keuntungan, dan aspek lingkungan. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam

kewirausahaan sosial harus dapat berjalan secara finansial, sosial, dan lingkungan yang bertanggung jawab. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Aisyianita (2017) menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial membantu perekonomian masyarakat Desa Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran pada bidang pariwisata di D.I.Yogyakarta. Kewirausahaan sosial yang diterapkan di D.I Yogyakarta berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar kawasan wisata dengan memberdayakan wanita dan para penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial telah berjalan secara finansial, sosial dan lingkungan.

Saat ini, penerapan kewirausahaan sosial dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat. Penerapan kewirausahaan sosial tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi individu-individu maupun kelompok masyarakat dan organisasi. Kewirausahaan sosial telah membawa dampak positif bagi masyarakat, seperti meningkatkan akses kesehatan bagi kaum miskin, mendorong perdamaian pada daerah konflik, membantu petani keluar dari kemiskinan dan lain-lain. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Safa'at (2014) pada PT Bina Swadaya Konsultasi (BSK) menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial telah dikembangkan pada PT BSK dengan tujuan menyebarkan *spirit entrepreneurship* dalam membangun bisnis yang jujur, membangun solidaritas usaha guna mendukung *supply chain* produksi dan pemasaran di level masyarakat, menciptakan sumber-sumber pendapatan yang halal secara independen dan berkelanjutan, meningkatkan *margin* bagi para pelaku usaha mikro sampai masyarakat marginal, serta memastikan keberlanjutan paska proyek yang mengarah kepada model bisnis yang terintegrasi. Penerapan kewirausahaan sosial diharapkan akan membantu perkembangan jangka panjang perusahaan karena adanya keselarasan antara proses bisnis dan misi sosial.

Kewirausahaan sosial merupakan konsep yang mencoba mulai usaha dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga antara masyarakat dan lembaga sama-sama bergotong royong untuk kesejahteraan bersama. Kewirausahaan sosial tidak hanya mengacu pada keuntungan secara materi atau finansial semata, namun juga keuntungan secara sosial (Yuliska, 2018).

Praktik kewirausahaan sosial ini merupakan sebuah alternatif berbasis masyarakat yang berpotensi menyempurnakan proses pembangunan, dimana masyarakat dijadikan partner dalam proses pembangunan. Hal ini tentunya mendorong masyarakat untuk dapat memecahkan permasalahan sosial bukan didasarkan kepada hal – hal yang bersifat patologis semata, melainkan melalui pengembangan potensi melalui kegiatan – kegiatan yang menyenangkan (Hadianti & Safitri, 2015).

Menurut Yayasan Schwab sebuah yayasan yang bergerak untuk mendorong aktivitas *social entrepreneurship* menyatakan bahwa : para *social entrepreneur* menciptakan dan memimpin organisasi, untuk menghasilkan laba ataupun tidak, yang ditujukan sebagai katalisator perubahan sosial dalam tataran sistem melalui gagasan baru, produk, jasa, metodologi, dan perubahan sikap. Definisi tersebut memberikan penjelasan bagaimana para *social entrepreneur* memajukan perubahan sistemik pada lingkungan sosialnya dengan cara mengubah perilaku dan pemahaman atau kesadaran orang-orang di sekitarnya (Astawa, 2016).

Kewirausahaan sosial memiliki dimensi-dimensi yang menjadi ciri khasnya. Dimensi kewirausahaan sosial menurut Hulgard (2010) yaitu: *social value, civil society, innovation*, dan *economic activity*.

*Social Value* merupakan elemen paling khas dari kewirausahaan sosial yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kewirausahaan sosial merupakan sebuah gerakan dengan misi sosial, yang diusahakan dengan upaya-upaya menemukan peluang dan mengolahnya

dengan inovasi dan proses belajar yang tiada henti serta kesiapan untuk bertindak tanpa dukungan sumber daya yang memadai (Wibowo dan Nulhaqim, 2015). Brooks (2009) mengemukakan tujuan dari nilai sosial, disisi lain mengacu pada nilai yang diciptakan oleh perusahaan untuk masyarakat, paling tidak, bagian yang dapat diukur dalam hal penghematan biaya atau pendapatan yang diciptakan sebagai dampak positif dari kehidupan masyarakat. Nilai sosial dalam hal ini merupakan satu terminologi yang agak sukar untuk didefinisikan.

*Civil Society* merupakan elemen kewirausahaan sosial yang berarti bahwa kewirausahaan sosial pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat. Seelos dkk (2010) mengembangkan kerangka pemahaman tentang hubungan antara kewirausahaan sosial dan keterikatannya dengan lingkungan masyarakat di mana praktik dilakukan. Kajian dilakukan dengan mengupas beberapa ilustrasi kasus di beberapa area masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa keterikatan dengan masyarakat setempat menjadi syarat untuk mengakses dan membangun sumber daya lokal, termasuk membangun kepercayaan dengan anggota masyarakat. Artinya, keterikatan dengan masyarakat lokal akan membantu membangun relasi yang kuat dan stabil dengan pemangku kepentingan luar (*eksternal stakeholders*).

*Innovation*. Kewirausahaan sosial memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial. Konsep kewirausahaan sosial membantu mempromosikan dan menandai proyek inovatif sosial. Dengan mengasumsikan posisi apapun yang didasarkan pada niat sosial, niat sosial itu meliputi relevansinya dengan kebutuhan sosial, keefektivannya dan interaksi. Memang kewirausahaan tidak mungkin dipisahkan dengan inovasi. Oleh karena itu, amat wajar jika wirausaha sosial memiliki dimensi inovasi sosial. Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa wirausaha bukanlah hanya sebagai

penemu ide (*invention*) semata, tetapi juga sebagai penambah nilai (inovasi) dari temuan yang sudah ada. Wirausaha memiliki keahlian khusus untuk melakukan inovasi karena mereka mengenal apa yang dibutuhkan pasar atau masyarakat.

*Economic Activity*. Kewirausahaan sosial yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis/ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan berkelanjutan misi sosial organisasi. Kewirausahaan sosial bergerak dengan cara yang khas dan berbeda dengan pola konvensional lainnya. Kewirausahaan sosial bergerak di masyarakat yaitu sebagai aktivitas bisnis dengan tujuan sosial sebagai hal yang utama, dimana surplus keuntungan diinvestasikan kepada tujuan utama yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian aktivitas yang dilakukan oleh sektor voluntari, dimana honor dibayarkan sebagai imbalan dari dikerjakannya sebuah produk atau layanan. Artinya aktivitas kewirausahaan sosial dapat bergerak di wilayah bisnis yang tujuan sosial yang jelas, ataupun di sektor *voluntary* dengan distribusi profit yang jelas.

Salah satu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah BUMDes. Merujuk pada buku panduan BUMDes (2007) "Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa". Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diatur dalam Peraturan Menteri tentang Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, tujuan dari dibentuknya BUMDes adalah sebagai instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini

terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Unit usaha dalam BUMDes dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa pasal 87, hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha (usaha yang dikelola oleh BUMDes), pembangunan desa seperti pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa.

BUMDes sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Keberadaan BUMDes di desa-desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan program-program yang sesuai dengan potensi desa. Seperti program Bumdes di desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, dari hasil penelitian ditemukan bahwa: Bumdes menyusun misi yang jelas yaitu mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat Babadan utamanya masyarakat kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Untuk mewujudkan harapan itu Bumdes membangun unit-unit usaha seperti unit Simpan Pinjam, unit Kredit Sepeda Motor, unit sektor riil penyewaan lahan bengkok desa, dan unit. Unit-unit

usaha yang mereka bentuk berorientasi kedepan untuk membantu masyarakat terutama dalam hal aspek permodalan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan juga membuka lapangan pekerjaan. Dari keterangan para informan dapat diketahui bahwa secara umum masyarakat desa Babadan merasa puas dan senang dengan kinerja Bumdes selama satu tahun ini terutama bagi masyarakat kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) (Nugroho, 2015).

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar (Depdiknas, 2007).

BUMDes adalah salah satu kelembagaan di desa yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong terciptanya peningkatan ekonomi desa. Penelitian yang dilakukan oleh Kirowati & Dwi (2018) pada BUMDes Desa Temboro menunjukkan bahwa pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat.

Keberadaan BUMDes di setiap desa diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2016) yang dilakukan di 3 (tiga) Desa di Gunungkidul, Yogyakarta, didapatkan kesimpulan bahwa keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial. BUMDes memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, walaupun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

BUMDes tetap diposisikan sebagai suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintahan desa. Tata kelola yang profesional dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat berjalannya BUMDes secara baik. Dengan demikian, kegiatan BUMDes yang profesional dan ideal dapat menjadi bagian usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional (Ridlwan, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2017) di Desa Ketapanrame juga menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memberikan banyak manfaat sosial seperti pengelolaan air bersih kepada seluruh warga dan juga menambah pendapatan desa. Sistem pengelolaan BPAM tahun 2011 mengalami perbaikan dan peningkatan dari pengelolaan sebelumnya (Hippam). Strategi pembangunan desa melalui BUMDes pada BPAM bisa dikatakan sudah optimal dalam pencapaiannya mensejahterakan masyarakat di Desa Ketapanrame.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumiasih (2019) juga menegaskan bahwa BUMDes memiliki peranan dalam mengembangkan potensi desa. Penelitian yang dilakukan di Desa Pakse, Kabupaten Klungkung menunjukkan bahwa BUMDes

Pakse Bali mampu mengelola sektor pariwisata desanya dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Penelitian tersebut dapat menunjukkan keberadaan BUMDes di desa sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia sejahtera dan berkeadilan. Pembangunan yang terus dilakukan di pedesaan hingga saat ini telah menunjukkan banyak kemajuan dari berbagai bidang seperti pendidikan, sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang salah satunya melalui pembentukan BUMDes.

Salah satu desa di Bali yang telah menjalankan BUMDes adalah Desa Panji. Desa Panji merupakan desa yang terletak di wilayah Bali utara tepatnya berada di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Total jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 9.804 Jiwa. Dengan luas desa 1061 ha yang terbagi atas delapan dusun, yakni Dusun Mekar Sari, Mandul, Dangin Pura, Dauh Pura, Kelodkauh, Bangah, Babakan dan Kembang Sari. Walaupun mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, tetapi masih banyak sektor yang dapat dikembangkan diantaranya sektor perkebunan, peternakan, kerajinan dan pariwisata. Dengan kondisi desa yang masih asri dan akses menuju desa yang mudah tentu dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Desa Panji.

BUMDes di Desa Panji sebenarnya telah didirikan pada tahun 2010, tetapi dalam pejalanannya tidak berjalan mulus. Tidak ada usaha yang dijalankan karena kurangnya perencanaan dari awal dibentuknya. Keadaan BUMDes hanya menjadi wadah yang tidak berjalan sesuai komitmen awal dibentuknya dan telah terjadi pergantian pengurus sebanyak dua kali. Di tahun 2016 dengan adanya

komitmen dan semangat baru serta perencanaan yang lebih matang dari pemerintah desa maka pada tanggal 16 Desember 2016 Desa Panji membangun kembali Badan Usaha Milik Desa dan diberi nama "BUMDes Bhuana Utama".

BUMDes "Bhuana Utama" adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, pengelolaan air dan toserba. Tujuan dibentuknya BUMDes Bhuana Utama adalah kedepannya diharapkan dapat memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga desa Panji. Adapun misi dari pendirian BUMDes Bhuana utama yaitu peningkatan perekonomian desa, pemanfaatan aset desa untuk kesejahteraan desa, peningkatan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta peningkatan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Pendirian BUMDes ini bukan lagi program 'topdown' atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga.

Saat ini belum pernah diteliti peran BUMDes Bhuana Utama dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau melalui kewirausahaan sosial. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai peran BUMDes Bhuana Utama dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau melalui pendekatan kewirausahaan sosial. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peran BUMDes Bhuana Utama dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau dari dimensi social value?
2. Bagaimanakah peran BUMDes Bhuana Utama dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau dari dimensi civil society?
3. Bagaimanakah peran BUMDes Bhuana Utama dalam peningkatan

kesejahteraan anggota ditinjau dari dimensi innovation?

4. Bagaimanakah peran BUMDes Bhuana Utama dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau dari dimensi economic activity?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau dari dimensi *social value*, *civil society*, *innovation*, dan *economic activity*.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran BUMDes Bhuana Utama dalam meningkatkan kesejahteraan anggota ditinjau dari dimensi kewirausahaan sosial. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Panji sebanyak 2.246 orang, sampel sebanyak 340 orang diambil menggunakan teknik proporsional sampling. Untuk memperoleh data yang diinginkan dan mencerminkan variabel penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data berupa angket/kuesioner.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah dengan menentukan jumlah skor dari setiap dimensi yang diperoleh atas data tabulasi yang dilakukan terhadap hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari kuesioner tentang kewirausahaan sosial dan kesejahteraan masyarakat, kemudian menentukan skor tertinggi dan terendah dari seluruh alternatif jawaban kuesioner dan menentukan rentang interval.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Peran BUMDes Bhuana Utama dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau dari dimensi social value dapat dilihat dari tiga indikator yaitu (1) keberadaan kewirausahaan sosial (BUMDes) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (2) dapat memengembangkan potensi desa, dan (3)

memberikan nilai tambah positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari dimensi *social value* berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dengan skor 10.712 berada rentang skor 10.404 – 12.851.

Peran BUMDes Bhuana Utama dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau dari dimensi *civil society* dapat dilihat dari tiga indikator yaitu mempekerjakan masyarakat sekitar, badan usaha dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat, dan menampung aspirasi masyarakat untuk kemajuan badan usaha. Hasil penelitian menunjukkan BUMDes Bhuana Utama BUMDes berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dengan skor 11.115 berada pada rentang skor 9.248 – 11.423.

Ditinjau dari dimensi *Innovation* peran BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan anggota dilihat dari tiga indikator yaitu memberikan kesempatan masyarakat untuk berkreasi mengembangkan produk, aktif memanfaatkan peluang dan potensi desa dan mengembangkannya untuk kesejahteraan desa, dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dengan skor 12.284 pada rentang skor 10.404 – 12.851.

Peran BUMDes Bhuana Utama ditinjau dari dimensi Economic Activity dapat dilihat dari dua indikator yaitu menjalankan usaha secara profesional yang dapat menghasilkan laba, dan usaha yang dijalankan dapat membantu perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dengan skor 12.352 pada rentang skor 10.404 – 12.851.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes Bhuana Utama ditinjau dari dimensi *social value* berperan dalam peningkatan kesejahteraan kepada Anggotanya. Hal tersebut sejalan dengan

pendapat Brooks (2009) yang mengemukakan “tujuan dari nilai sosial mengacu pada nilai yang diciptakan oleh perusahaan untuk masyarakat seperti dalam hal penghematan biaya atau pendapatan yang diciptakan sebagai dampak positif dari kehidupan masyarakat”.

BUMDes Bhuana Utama sangat membantu masyarakat dalam berbagai transaksi keuangan. BUMDes Bhuana Utama juga melakukan kerjasama dengan beberapa bank sehingga masyarakat lebih mudah dalam melakukan transfer dan tarik tunai. Manfaat sosial lainnya yang diberikan oleh BUMDes Bhuana Utama adalah dengan adanya pengelolaan air bersih dan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BUMDes. Pengelolaan air yang lebih terorganisir dan menggunakan teknologi yang lebih modern telah memudahkan masyarakat dalam mengakses air, dan telah meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa) Desa Panji. Selain itu BUMDes Bhuana Utama juga berupaya mengembangkan potensi desa seperti bekerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang kehutanan untuk membentuk hutan wisata di Desa Panji. Jadi dengan berbagai manfaat sosial yang diberikan oleh BUMDes Bhuana Utama telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Panji. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hekmantyar and Nugroho (2018) didalam perekonomian penduduk Desa Kedungprimpen, BUMDes memiliki peran penting didalam pengelolaan irigasi, yang artinya BUMDes bertanggungjawab penuh untuk melakukan pendistribusian air kesetiap lahan pertanian penduduk Desa Kedungprimpen. Pada tahap ini, BUMDes tidak saja penting untuk menekankan pada partisipasi penduduk secara aktif, tetapi juga harus memberikan prioritas pada kebijakan yang mendukung penuh usaha ekonomi penduduk, yang dalam hal ini adalah pertanian.

Ditinjau dari dimensi *civil society* keberadaan BUMDes Bhuana Utama dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Panji. BUMDes juga memberikan bantuan modal yang



dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan BUMDes dengan terlibat sebagai pegawai BUMDes maupun sebagai anggota yang memanfaatkan bantuan modal BUMDes untuk berwirausaha. Sehingga dengan adanya hubungan timbal balik yang positif antara masyarakat dengan BUMDes Bhuana Utama dapat mengembangkan BUMDes itu sendiri dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Seelos dkk (2010) dengan mengupas beberapa ilustrasi kasus di beberapa area masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa keterikatan dengan masyarakat setempat menjadi syarat untuk mengakses dan membangun sumber daya lokal, termasuk membangun kepercayaan dengan anggota masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Athsil (2017) yang menunjukkan bahwa BUMDesa mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Dengan adanya BUMDes memberikan motivasi dan stimulus masyarakat dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga.

Ditinjau dari dimensi *innovation* BUMDes Bhuana Utama telah senantiasa melakukan berbagai inovasi sosial sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Zimmerer dan Scarborough (dalam Agustina, 2015) inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan masyarakat. BUMDes Bhuana Utama memfasilitasi masyarakat agar terus berkreasi dan berinovasi terhadap

produk yang akan anda pasarkan dengan cara memberikan bantuan modal. BUMDes membantu menawarkan produk masyarakat ke pasar sehingga masyarakat tidak harus menjual hasil usaha kepada perantara dengan harga yang sangat murah yang dapat merugikan masyarakat. BUMDes Bhuana Utama juga berinovasi dengan bekerjasama dengan LWR (*Lutheran World Relief*) untuk mengembangkan potensi hutan wisata di desa Panji. Dalam menjalankan usahanya BUMDes Bhuana Utama telah memiliki *website* tersendiri sehingga masyarakat bisa melihat transparansi perkembangan BUMDes, dan mempromosikan usaha dan kegiatan masyarakat melalui *website/internet*. Hal tersebut di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aslamiah (2017) yang menunjukkan bahwa keberadaan Bumdes Panggung Lestari yang berlokasi di Sewon, Bantul Yogyakarta berperan sebagai lembaga pelayanan berbasis masyarakat dalam hal penyebaran informasi dan mendorong pembuatan jaringan untuk pengelolaan sampah dan relokasi sumber daya.

Ditinjau dari dimensi *economic activity* BUMDes Bhuana Utama berdiri dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti simpan pinjam, pengelolaan air, pengelolaan sampah, toserba dan pengelolaan hutan wisata yang telah meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa). Selain itu BUMDes Bhuana Utama memberikan harga yang terjangkau di setiap produk (barang dan jasa) yang didirikan. Dalam kegiatannya untuk mencari keuntungan, BUMDes Bhuana Utama juga memberikan manfaat sosial dengan menyumbangkan sebagian keuntungan yang diperoleh BUMDes untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hulgard (2010) yang menyatakan bahwa kewirausahaan sosial yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiasih (2019) yang menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan

memperhatikan jenis sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga dapat menjadi contoh untuk desa lain yang belum mampu mengelola potensi wisatanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat desa.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Adapun simpulan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau dalam dimensi *social value* dengan skor 10.712 pada rentang skor 10.404 – 12.851, ditinjau dalam dimensi *civil society* dengan BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dengan skor 11.115 pada rentang skor 9.248 – 11.423, ditinjau melalui dimensi *innovation* BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dengan skor 12.284 pada rentang skor 10.404 – 12.851, dan ditinjau melalui dimensi *economic activity* BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dengan skor 10.404 – 12.851.

### Saran

Bagi BUMDes Bhuana Utama, diharapkan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terus berusaha mengembangkan usaha dengan cara memanfaatkan peluang dan potensi desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan desa.

Bagi Masyarakat Desa Panji, diharapkan terus berkontribusi untuk ikut mengembangkan BUMDes baik sebagai anggota yang menggunakan layanan jasa BUMDes dan juga mendukung kegiatan yang dilakukan BUMDes.

Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitiannya dengan meneliti peran BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan anggota

## DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. 2015. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Agustina, T. S. 2015. *Kewirausahaan: Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Aisyianita, R. A. 2017. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di D.I Yogyakarta Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial (Sociopreneurship). *Jurnal Media Wisata*, 15(2), 608–618.

Amanda, H. W. 2017. Strategi Pembanguna Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya*, 4(1), 7–12.

Anggraeni, M. R. R. S. 2016. Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan. *Modus*, 28(2), 155–167.

Aslamiah, R. 2017. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta*. Skripsi (Tidak Diterbitkan) Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Astawa, I. P. 2016. Studi Kasus Kewirausahaan Sosial di Bali dalam Pendekatan Konseptual. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(1), 12–21.

Athsil, M. 2017. *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*. Skripsi (Tidak Diterbitkan) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam

Negeri Raden Intan.

- Bornstein, D., & Davis, S. 2010. *Social Entrepreneurship (What Everyone Needs to Know)*. New York: Oxford University Press.
- Brooks, A. C. 2009. *Social Entrepreneurship; A Modern Approach to Social Value Creation* (Vol. 3). New Jersey: Pearson Education.
- Hadianti, W. S., & Safitri, Y. 2015. Pengembangan Potensi Pemuda-Pemudi Bandung Melalui Gerakan Kewirausahaan Sosial. *Social Work Journal*, 42(2), 268–272.
- Hasanah, L. L. N. El. 2018. Pengembangan Kewirausahaan Sosial Pada Perguruan Tinggi Melalui Social Project Competition. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 90–99.
- Hekmantyar, V., & Nugroho, F. 2018. Badan usaha milik desa dan pembangunan sosial di kabupaten bojonegoro. *Sosio Konsepsia*, 7(03), 176–189.
- Hulgard, L. 2010. *Discourses of Social Entrepreneurship-Variations of The Same Theme*. Denmark: EMES European Research Network.
- Kasmir. 2014. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaswan, & Akhyadi, A. S. 2017. *Social Entrepreneurship (Mengubah Masalah Sosial Menjadi Peluang Usaha)*. Bandung: Alfabeta.
- Kirowati, D., & Dwi, L. 2018. Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(1), 15–11.
- Noor, H. F. 2015. *Ekonomi Publik Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Indeks.
- Nugroho, D. A. 2015. Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ( Periode Mei 2014 – April 2015 ). *JESP*, 7(2), 79–84.
- Ridwan, Z. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dalam Pembangun Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, 8(3), 424–440.
- Safa'at, I. 2014. Strategi Pengembangan Kewirausahaan Sosial PT Bina Swadaya Konsultan. *Manajemen IKM*, 9(2), 170–178.
- Seelos, C., & Mair, J. 2010. The embeddedness of social entrepreneurship: Understanding variation across local communities. *Forthcoming in: Research in the Sociology of Organizations*, 33, 1–42.
- Sumiasih, K. 2019. Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 565–585.
- Wibowo, H., & Nulhaqim, S. A. 2015. *Kewirausahaan Sosial; Revolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*. Bandung: UNPAD Press.
- Yuliska. 2018. Model Kewirausahaan Sosial di Lembaga Agriculture Entrepreneur Clinics. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2(1), 151–172.